

ABSTRAK

Halima Tuz Zaadiah, 080220013 “Pemberian Remisi dan Pembebasan Bersyarat Menurut UU No 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan serta Ditinjau dari Aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate” dibimbing oleh **Nam Rumkel** dan **Hendra Karianga**.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Untuk mengetahui dan menganalisis Pemberian remisi dan Pembebasan Bersyarat menurut UU No 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan serta dilihat dari aspek Hak Asasi Manusia bagi Narapidana Korupsi di Lapas Kelas IIA Ternate. (2) Untuk mengetahui dan menganalisis Faktor-faktor yang menjadi penghambat narapidana korupsi sulit memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan dan pembahasan tesis ini adalah secara yuridis empiris, yaitu dengan melakukan pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen, pengisian Kuisisioner kepada Narapidana Tipikor dan Wawancara terhadap Kasi Binadik yang penulis lakukan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Ternate.

Berdasarkan analisis dan temuan data yang ada saat ini, Penerima remisi dan pembebasan bersyarat bagi narapidana koruptor dalam kurun waktu 2017—2021 masih rendah, sehingga sulit memperoleh keadilan. Adapun faktor-faktor narapidana tipikor sulit menerima remisi dan Pembebasan Bersyarat yaitu adanya Peraturan Pemerintah nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tata cara pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan (substansi hukum), yang memberatkan narapidana sulit memperoleh remisi dan Pembebasan Bersyarat. Pemberatan berupa adanya aturan tambahan menjadi *Justice Collaborator* dan membayar denda bagi narapidana tipikor. Denda yang ditetapkan oleh pengadilan sangat besar sehingga narapidana tipikor tidak sanggup memenuhi hal tersebut

Kata Kunci : Remisi, Pembebasan Bersyarat, Tipikor, Lapas.

ABSTRACT

Halima Tuz Zaadiah, 080220013 "Granting of Remissions and Parole according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections Viewed from the Human Rights Aspect of Corruption Convicts in Class IIA Ternate Prisons" supervised by **Nam Rumkel** and **Hendra Karianga**.

The research aims to (1) determine and analyze the granting of remissions and parole according to Law No. 12 of 1995 concerning Corrections viewed from the aspect of Human Rights of Corruption Convicts in Class IIA Ternate Prisons. (2) To find out and analyze the factors that hinder corruption convicts to obtain remission and parole.

The method used is empirical-juridical research by collecting data through documents, questionnaires filled by corruption prisoners and Interview with the head of the prisoners/student guidance section conducted at the Class IIA Ternate Prisons

Based on the analysis of recent findings, recipients of remission and parole for corruption convicts in the period of 2017—2021 period are still low, so it makes difficult to obtain justice. The factors that make it difficult for corruption inmates to receive remission and parole are the existence of Government Regulation number 99 of 2012 concerning the second amendment to Government Regulation Number 32 of 1999 concerning the requirements and procedures for the implementation of the Rights of Correctional Inmates (legal substance), which makes it difficult for prisoners to obtain remission and parole. The aggravating thing is the additional rules to be a justice collaborator and paying fines for convicts of corruption. The fine set by the court is very big that the corruption convicts are unable to fulfill it.

Keywords: Remission, parole, Corruption, Prison.